

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab-bab terdahulu telah diuraikan terkait kondisi riil serta tantangan yang ada di Kota Malang selama ini berikut aspek pembiayaan atas kebijakan daerah yang akan diambil guna menjawab tantangan tersebut. Sebelum kebijakan riil yang perlu untuk diambil guna mencapai tujuan pembangunan daerah di Kota Malang lima tahun ke depan perlu dilakukan terlebih dahulu analisis atas isu strategis berdasarkan kondisi riil yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari dokumen RPJMD ini.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, guna melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu-isu

strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dengan adanya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya dilakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang,

dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi. Sumber lain bagi informasi atau isu strategis berasal dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada data kondisi riil sebagaimana telah diuraikan pada

Bab II dokumen RPJMD ini. Hal tersebut kemudian dianalisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Adapun salah satu indentifikasi permasalahan pembangunan adalah ketimpangan antar wilayah dalam berbagai sektor, diantaranya adalah :

A. PENDIDIKAN

Tabel 4.1.

Rasio Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta Tahun
2012/2013

No	Kecamatan (1)	Sekolah (2)	Guru (3)	Murid (4)	Rasio Sekolah Murid (5)	Rasio Guru Murid (6)
1	Kedungkandang	58	316	3730	64	12
2	Sukun	68	273	4375	64	16
3	Klojen	71	301	4293	60	14
4	Blimbing	64	283	4108	64	15
5	Lowokwaru	68	293	3524	52	12
	Kota Malang	329	1466	20030	61	14

Rata rata rasio sekolah/murid TK di Kota malang adalah 1 : 61, dengan demikian ketersediaan Sekolah TK di seluruh Kecamatan tidak terdapat ketimpangan yang berarti. Namun demikian capaian rasio guru/murid di Kecamatan Sukun dan Blimbing masih berada di bawah rata-rata Kota Malang.

Tabel 4.2.

Rasio Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta Tahun
2012/2013

No	Kecamatan (1)	Sekolah (2)	Guru (3)	Murid (4)	Rasio Sekolah Murid (5)	Rasio Guru Murid (6)
1	Kedungkandang	54	755	15111	280	20
2	Sukun	55	800	16260	296	20
3	Klojen	42	687	12417	296	18
4	Blimbing	53	896	17038	321	19
5	Lowokwaru	58	888	15910	274	18
	Kota Malang	262	4026	76736	293	19

Rata rata rasio sekolah/murid SD di Kota malang adalah 1 : 293, dengan demikian ketersediaan Sekolah SD di seluruh Kecamatan tidak terdapat ketimpangan yang berarti. Capaian rasio guru/murid di seluruh Kecamatan tidak terdapat ketimpangan yang berarti.

Tabel 4.3.

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan
Swasta Tahun 2012/2013

No	Kecamatan (1)	Sekolah (2)	Guru (3)	Murid (4)	Rasio Sekolah Murid (5)	Rasio Guru Murid (6)
1	Kedungkandang	15	374	5265	351	14
2	Sukun	15	355	5336	356	15
3	Klojen	24	735	11138	464	15
4	Blimbing	19	437	6600	347	15
5	Lowokwaru	17	470	6706	394	14
	Kota Malang	90	2371	35045	389	15

Tidak terdapat ketimpangan yang berarti dalam ketersediaan sekolah dan guru jenjang SLTP di seluruh Kecamatan.

Tabel 4.4.
Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Umum Negeri dan Swasta Tahun
2012/2013

No	Kecamatan (1)	Sekolah (2)	Guru (3)	Murid (4)	Rasio Sekolah Murid (5)	Rasio Guru Murid (6)
1	Kedungkandang	5	168	1778	356	11
2	Sukun	6	97	438	73	5
3	Klojen	18	756	9684	538	13
4	Blimbing	5	83	374	75	5
5	Lowokwaru	9	342	4919	547	14
	Kota Malang	43	1446	17193	400	12

Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta Di Bawah
Kementerian Agama Tahun 2012/2013

No	Kecamatan (1)	Sekolah (2)	Guru (3)	Murid (4)	Rasio Sekolah Murid (5)	Rasio Guru Murid (6)
1	Kedungkandang	21	238	3449	164	14
2	Sukun	12	149	2432	203	16
3	Klojen	6	135	2589	432	19
4	Blimbing	5	49	1057	211	22
5	Lowokwaru	5	49	681	136	14
	Kota Malang	49	620	10208	208	16

Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta Di Bawah
Kementerian Agama Tahun 2012/2013

No	Kecamatan (1)	Sekolah (2)	Guru (3)	Murid (4)	Rasio Sekolah Murid (5)	Rasio Guru Murid (6)
1	Kedungkandang	12	188	1316	110	7
2	Sukun	2	45	575	288	13
3	Klojen	5	132	1403	281	11
4	Blimbing	2	30	315	158	11
5	Lowokwaru	5	86	902	180	10
	Kota Malang	26	481	4511	174	9

Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Di Bawah
Kementrian Agama Tahun 2012/2013

No	Kecamatan (1)	Sekolah (2)	Guru (3)	Murid (4)	Rasio Sekolah Murid (5)	Rasio Guru Murid (6)
1	Kedungkandang	5	85	345	69	4
2	Sukun	1	20	323	323	16
3	Klojen	4	118	912	228	8
4	Blimbing	1	13	24	24	2
5	Lowokwaru	4	110	1178	295	11
Kota Malang		15	346	2782	185	8

- a. Tingginya minat masyarakat di dalam dan luar kota Malang terhadap sekolah.
- b. Kualitas dan kuantitas sarana pembelajaran yang mendekati sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- c. Penyebaran tenaga kependidikan secara kualitas dan kuantitas belum merata.
- d. Perhitungan data di Biro Pusat Statistik, masih menggunakan sistem proyeksi, sehingga data penduduk usia sekolah belum valid.
- e. Masih rendahnya tingkat pelayanan sekolah di tingkat SMA/MA karena rendahnya jumlah sekolah di tingkat SMA/MA.
- f. Rata-rata input pada sekolah swasta dibawah rata-rata input sekolah negeri, dan rendahnya motivasi yayasan penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan.

- g. Beban kurikulum terlalu padat, kegiatan ekstra kurikuler kurang maksimal.
- h. Belum dijalankannya fungsi dan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan secara maksimal.

B. KESEHATAN

Tabel 4.5.

Jumlah dan Rasio Dokter per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Dokter	Rasio
1	Kedungkandang	31	6.514
2	Sukun	57	3.567
3	Klojen	194	617
4	Blimbing	17	11.685
5	Lowokwaru	97	1.760
Kota Malang		396	2.258

Kecamatan Blimbing dan Kedungkandang tergolong kekurangan tenaga dokter karena rasio dua kecamatan ini masing-masing 1 : 11.685 dan 1 : 6514.

Tabel 4.6.

Jumlah dan Rasio Perawat per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Perawat	Rasio
1	Kedungkandang	300	673
2	Sukun	223	912
3	Klojen	962	124
4	Blimbing	30	6.622
5	Lowokwaru	417	410
Kota Malang		1.932	463

Kecamatan Blimbing tergolong kekurangan tenaga perawat karena rasio Kecamatan ini adalah 1 : 6.622.

Tabel 4.7.

Jumlah dan Rasio Bidan per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Bidan	Rasio
1	Kedungkandang	38	5.314
2	Sukun	39	5.213
3	Klojen	63	1.899
4	Blimbing	20	9.932
5	Lowokwaru	263	649
	Kota Malang	423	2.114

Beberapa Kecamatan yang tergolong kekurangan tenaga bidan adalah Kedungkandang dengan rasio 1 : 5.314, Sukun dengan rasio 1 : 5.213, Klojen dengan rasio 1 : 1.899, dan Blimbing 1 : 9.932

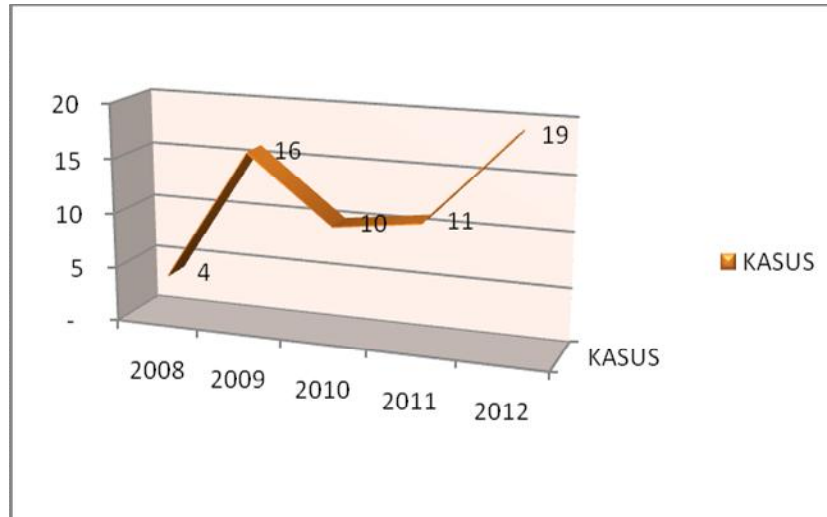
Permasalahan kesehatan yang ada di Kota Malang tidak terlepas dari masalah kesehatan ibu, bayi dan balita.

1. Permasalahan Kesehatan Ibu

Kasus kematian ibu masih terjadi di Kota Malang dan mengalami peningkatan pada tahun 2012. Dampaknya adalah angka kematian ibu meningkat walaupun masih dibawah angka propinsi. Adapun angka kematian ibu (AKI) dilaporkan pada tahun 2012 mencapai 164,64 per 100.000 kelahiran. Artinya dalam setiap 100.000 kelahiran hidup terjadi kematian ibu antara 164 – 165 kasus. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 90,4 per 100.000 kelahiran hidup. Berikut ini perkembangan kasus kematian ibu dalam 5 tahun.

Grafik 4.8.

Kasus Kematian Ibu Kota Malang 2008 – 2012

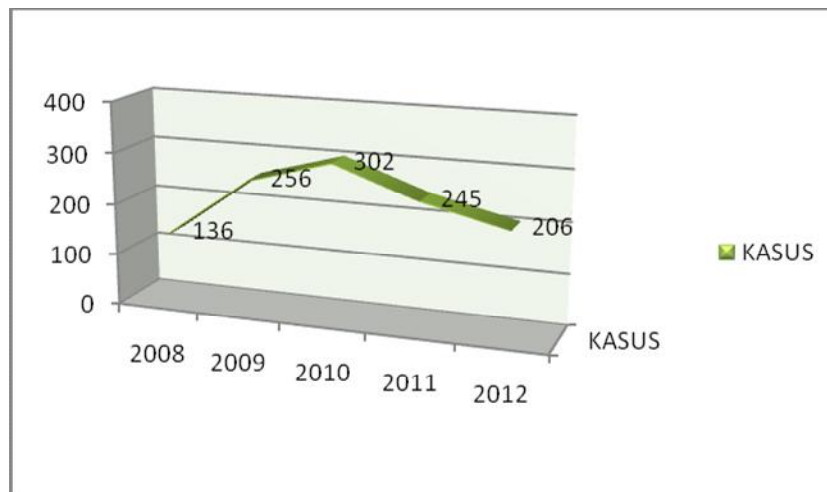


2. Permasalahan Kesehatan Bayi

Kasus kematian bayi di Kota Malang masih tergolong tinggi walau terjadi penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun. Berikut ini trend kasus kematian bayi di Kota Malang selama 5 tahun.

Grafik 4.9.

Kasus Kematian Bayi Kota Malang 2008 – 2012



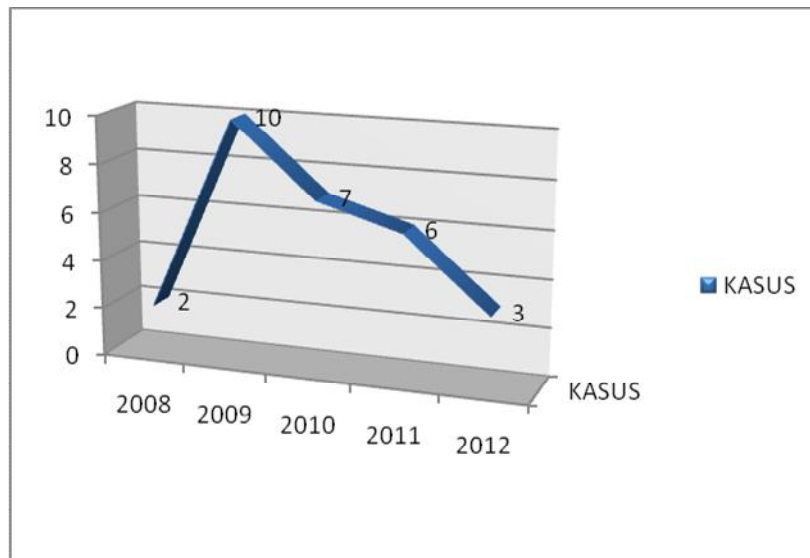
Selama tahun 2012 telah terjadi 206 kasus kematian bayi. Kasus ini menurun jika dibandingkan dengan kasus tahun 2011 yang mencapai 245 kasus. Angka kematian bayi (AKB) Kota Malang mencapai 17,85 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya dalam setiap 1.000 kelahiran yang dilaporkan, terdapat kematian bayi antara 17 hingga 18 bayi. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan angka kematian bayi pada tahun 2011 yang mencapai 20,1 per 1.000 kelahiran hidup.

3. Permasalahan Kesehatan Anak Balita

Kasus kematian anak balita di Kota Malang pada tahun 2012 menurun sangat tajam. Berikut adalah perkembangan kasus kematian anak balita selama 5 tahun.

Grafik 4.10.

Kasus Kematian Balita Kota Malang 2008 – 2012



Angka kematian anak balita (AKABA) di Kota Malang pada tahun 2012 mencapai 0,26 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya dalam 1.000 kelahiran hidup yang dilaporkan terjadi kematian 0 hingga 1 anak balita. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 0,5 per 1.000 kelahiran hidup.

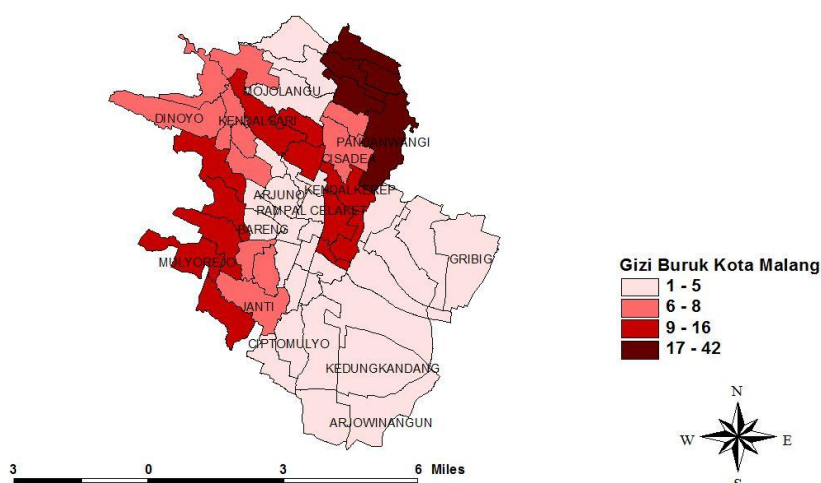
4. Permasalahan Gizi Buruk

Permasalahan gizi buruk senantiasa ada, selama masalah kemiskinan di suatu daerah ada maka masalah gizi buruk akan senantiasa ada pula. Berikut ini distribusi kasus gizi buruk di Kota Malang berdasarkan puskesmas selama tahun 2012 yang berjumlah 136 kasus.

Grafik 4.11.

Kasus Gizi Buruk Kota Malang 2012

Gizi Buruk Kota Malang Tahun 2012



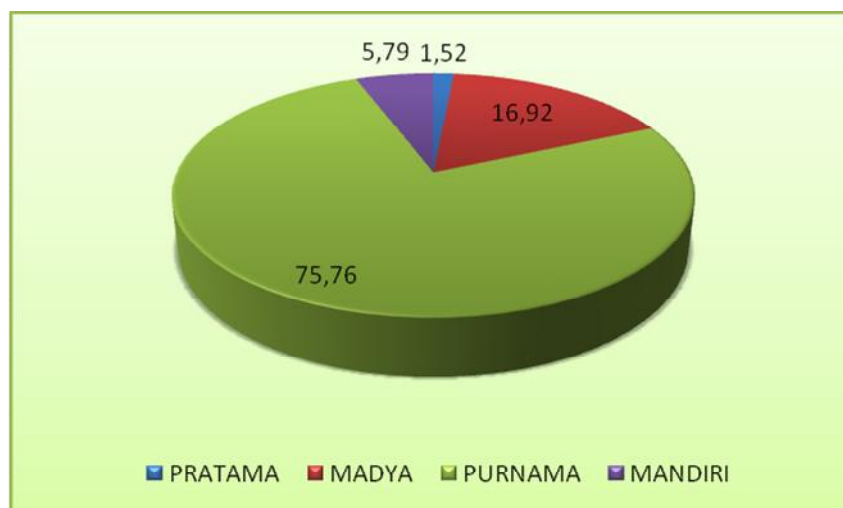
5. PERAN SERTA MASYARAKAT

Selama tahun 2012, Kota Malang memiliki 57 kelurahan siaga, dan 56 kelurahan dalam keadaan aktif, atau mencapai 98,25%. Selain kelurahan siaga juga ada poskeskel. Seluruh kelurahan di Kota Malang pada tahun 2012 yang berjumlah 57 kelurahan telah memiliki poskeskel.

Sedangkan upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat secara langsung juga diadakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Diantara Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tersebut adalah posyandu (pos pelayanan terpadu), polindes (pondok bersalin kelurahan), toga (tanaman obat keluarga), POD (pos obat kelurahan), dan sebagainya.

Presentase posyandu menurut strata di Kota Malang pada tahun 2012 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 4.12.
Prosentase Posyandu Menurut Strata Kota Malang 2012



Dari 656 posyandu yang ada di Kota Malang pada tahun 2012, 75,76% atau 497 adalah posyandu purnama, 16,92% adalah posyandu madya atau 111 posyandu, 5,79% adalah posyandu mandiri atau 38 posyandu, dan demikian juga dengan posyandu pratama yang mencapai 1,52% atau 10 posyandu. Selain posyandu untuk balita, juga terdapat 319 posyandu untuk lansia di Kota Malang.

6. KONDISI FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN

Kota Malang adalah lahan subur untuk segala macam jenis industri. Industri pangan, jamu, obat-obatan, dan lain-lain. Peredaran makanan dan minuman di satu sisi mendatangkan banyak keuntungan dan di sisi lain akan mendatangkan masalah jika makanan yang beredar adalah makanan yang tidak aman. Hal ini akan dapat menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat Kota Malang dan sekitarnya.

Hingga tahun 2012, kondisi farmasi dan pangan di Kota Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13.
Kondisi Farmasi dan Pangan Kota Malang 2012

Situasi	2012
Pangan	
1. Industri Rumah Tangga Makanan	208
2. Jumlah Pasar	10
3. Jumlah Distributor Pangan / Toko	52
Farmasi	
1. Apotek	206
2. Toko Obat	4
3. PBF	27
4. Industri Kecil Obat Tradisional	8
Kosmetik	
1. Industri Kosmetik	4
2. Salon / Toko Kosmetik	72
Sarana Obat Puskesmas	
1. Puskesmas	15
2. Rumah Bersalin Pemkot	1
3. Puskesmas Pembantu	33

Situasi diatas menunjukkan bahwa Kota Malang menjadi salah satu rujukan utama industri pangan dan farmasi. Peredaran makanan, minuman, dan obat-obatan yang tidak aman akan menimbulkan masalah kesehatan masyarakat.

Dari jumlah diatas, hanya 18% PIRT yang berada dalam kondisi baik dan 80% dalam kategori cukup selama tahun 2007. Pada tahun yang sama, 97,3% apotek telah melakukan pengelolaan apotek dengan baik dan terjadi 4 kali pelanggaran.

Selama tahun 2012, telah dilakukan pengujian terhadap bahan makanan berbahaya. Dari 50 yang diperiksa, 52% mengandung bahan berbahaya dan yang memenuhi syarat 48%. Demikian juga, dalam tahun yang sama terjadi pencampuran bahan kimia obat dengan jamu sebanyak 2%.

C. LINGKUNGAN HIDUP;

Kualitas Lingkungan Hidup menggambarkan Kualitas Air Sungai dan Udara terhadap Baku Mutu. Pengujian kualitas air sungai melalui pengukuran Kualitas BOD atau kebutuhan oksigen biologis serta melalui pengukuran COD, dimana COD menunjukkan jumlah bahan kimia secara total yang masuk ke badan air selama kurun waktu lima tahun. Uji ABA yang dilakukan di 15 titik pantau didapatkan hasil semua titik tersebut Uji parameter BOD (Biological Oxygen Demand) melebihi standart baku muku sedangkan untuk COD(Cheical Oxsigen Demand) ada 8 titik yang melebihi Standart Baku Mutu .

Dari aspek kualitas udara, tingkat aktivitas yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan mengakibatkan polusi udara yang cukup memprihatinkan. Dari Uji Kualitas Udara yang dilakukan pada 13 titik dengan hasil sesuai Standat Baku Mutu yang disyaratkan, terbukti Kota Malang pada tahun 2013 mendapatkan Penghargaan Langit Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam urusan lingkungan hidup antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Kota Malang;
- b. Belum optimalnya pengelolaan limbah domestik maupun limbah rumah tangga;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- d. Minimnya jumlah ruang terbuka hijau;
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat maupun dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan lingkungan hidup, maka dirumuskan isu strategis pembangunan sektor lingkungan hidup yaitu : **“belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup serta kurangnya kesadaran masyarakat maupun dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Malang”**.

D. PEKERJAAN UMUM;

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum sangat mempengaruhi ketersediaan infrastruktur di Kota Malang. Peningkatan kapasitas serta kualitas jalan dan jembatan serta sarana pengairan juga pembangunan gedung-gedung pemerintahan maupun pembangunan gedung untuk masyarakat diupayakan dalam rangka menunjang peningkatan perekonomian daerah.

Beberapa permasalahan mendasar dalam bidang pekerjaan umum antara lain :

- a. Masih banyak jalan Kota Malang yang berkondisi rusak, sehingga diperlukan peningkatan dan perbaikan jalan.
- b. Data untuk Panjang Jalan Kota Malang adalah 191,19 Km yang meliputi Jalan Negara, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota. Sampai dengan saat ini (2013) belum ada penambahan ruas jalan baru sebagai penambahan infrastruktur transportasi;
- c. Terjadinya penurunan/longsor pada beberapa ruas jalan yang lokasinya rawan longsor sehingga perlu dilakukan pembangunan tembok penahan tanah dan turap di sepanjang Sungai Brantas, Sungai Metro, dan Sungai Kalimewek;
- d. Dalam hal penanganan drainase dan jaringan irigasi perlu adanya studi kelayakan terlebih dahulu, penyusunan master plan drainase perkotaan di tiap wilayah kecamatan di Kota Malang, pembangunan reservoir, pembangunan pompa pengendali banjir, pembangunan

dan pemeliharaan saluran drainase, pembangunan turap/tanggul/bronjong, pembangunan bendung dan pintu air, serta pembangunan embung;

- e. Perlunya pembangunan sumur-sumur imbuh, baik oleh Pemerintah Kota Malang, pihak swasta maupun masyarakat;
- f. Peralatan penunjang pendukung bidang pekerjaan umum masih kurang.

Berdasarkan beberapa mendasar dalam urusan pekerjaan umum, maka dirumuskan dalam isu strategis pembangunan sektor pekerjaan umum yaitu : **belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Kota Malang, sehingga tingkat kerusakan jalan, jembatan, drainase masih cukup tinggi.**

E. PENATAAN RUANG;

Sebagaimana visi penataan ruang yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diarahkan untuk mewujudkan misi penataan ruang, yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam urusan penataan ruang antara lain adalah :

- a. Belum meratanya pembangunan antara pusat kota dengan sub pusat kota;
- b. Rencana detail tata ruang masih dalam proses persetujuan substansi;

- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang di Kota Malang;
- d. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. Alih fungsi lahan pertanian, karena seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Malang, tidak dapat dihindarkan alih fungsi Lahan Peruntukkan Pertanian menjadi Perumahan, namun Kota Malang tetap akan berupaya mempertahankan lahan pertanian.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan penataan ruang, maka dirumuskan isu strategis pembangunan sektor penataan ruang yaitu : **Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Malang.**

F. PERENCANAAN PEMBANGUNAN;

Perencanaan pembangunan daerah ditujukan untuk memperoleh hasil pembangunan yang maksimal, dimana pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan di Kota Malang dimulai dari pelaksanaan musrenbang (kelurahan, kecamatan, kota). Hasil musrenbang tersebut akan dijadikan bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Malang. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan antara lain :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan belum bisa dilaksanakan secara optimal, karena keterbatasan anggaran;
- b. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang, hal ini dapat terlihat dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota;
- c. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan;
- d. Masih kurangnya peran SKPD dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat;
- e. Kurangnya konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan alokasi penganggarnya;
- f. Pengendalian dan evaluasi pembangunan belum dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan perencanaan pembangunan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan sektor perencanaan pembangunan yaitu : **belum optimalnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Malang, karena masih rendahnya tingkat partisipasi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dan kurang tajamnya SKPD dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan daerah.**

G. PERUMAHAN;

Perumahan dan pemukiman akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Penataan perumahan dan

pemukiman meliputi air bersih, drainase, jalan lingkungan, pemakaman, sanitasi serta persampahan. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam urusan perumahan antara lain :

- a. Rencana tata bangunan dan lingkungan belum tercipta (belum ada Peraturan Daerah tentang Tata Bangunan dan Lingkungan);
- b. Masih banyak rumah/masyarakat yang belum mempunyai MCK, dimana di beberapa lokasi masih menggunakan sungai;
- c. Masih ada pemukiman kumuh di beberapa wilayah, khususnya di sekitar sempadan sungai dan sempadan rel kereta api;
- d. Akses air bersih untuk masyarakat masih kurang;
- e. Pentingnya Penataan drainase pemukiman;
- f. Fasilitas umum dan fasilitas sosial masih banyak yang belum diserahkan pada Pemerintah Kota Malang (jumlah pengembang, jumlah perumahan, jumlah fasos/fasum yang sudah serah terima);
- g. Pelayanan sanitasi belum menjangkau seluruh wilayah Kota Malang;
- h. Masih banyak rumah tinggal yang belum memiliki IMB;
- i. Masih kurangnya sarana Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- j. Terbatasnya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA;

- k. Terbatasnya sarana TPA yang terencana dengan baik dan disetujui oleh warga sekitarnya.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan perumahan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan sektor perumahan yaitu : **belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan serta masih tingginya persentase rumah tinggal yang belum layak huni, serta belum optimalnya pengelolaan persampahan.**

H. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA;

Permasalahan utama dalam pembangunan olahraga di Kota Malang adalah masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh urusan kepemudaan dan olahraga antara lain adalah :

- a. Kurangnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan;
- b. Kurangnya pembinaan dalam peningkatan prestasi olahraga di tingkat Kota;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mewadahi generasi muda dalam berkreativitas;
- d. Permasalahan kepemudaan masih cukup tinggi, yaitu dalam hal penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan pemuda dan olah raga, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan pemuda dan olahraga yaitu: **belum optimalnya penyediaan**

sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan serta masih munculnya permasalahan sosial di kalangan pemuda.

I. PENANAMAN MODAL;

Peningkatan penanaman modal/investasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Malang. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam meningkatkan laju investasi di Kota Malang antara lain adalah :

- a. Kurangnya promosi investasi.
- b. Terbatasnya lahan bagi industri skala menengah dan kecil.

Berdasarkan dua permasalahan mendasar dalam urusan penanaman modal, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan penanaman modal yaitu: **belum optimalnya promosi investasi di Kota Malang.**

J. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH;

Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang, maka perlu dikembangkan sektor koperasi dan UKM, karena pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan koperasi dan UKM antara lain adalah :

- a. Kurangnya permodalan yang disebabkan oleh sulitnya UMKM untuk memenuhi aturan-aturan yang harus

dilengkapi sebagai salah satu persyaratan permodalan dari sumber pembiayaan baik dari Perbankan maupun BUMN, dimana harus melampirkan agunan dengan suku bunga yang terlalu tinggi.

- b. Kualitas SDM koperasi dan pengelola UMKM yang masih terbatas, tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga kurang memiliki kreativitas serta belum menggunakan hasil penelitian dan inovasi teknologi yang tepat dalam mengembangkan bisnis mereka;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana, kerjasama dan gerakan koperasi;
- d. Kurangnya jaringan usaha, sehingga belum mampu menciptakan komunikasi yang baik antara pelaku usaha dengan pengusaha besar sehingga diharapkan dapat mengembangkan akses pasar lokal dan pelaku usaha belum mampu mencari peluang pasar. Kurangnya kemandirian UMKM dalam meningkatkan daya saing untuk berkarya dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas;
- e. Kebijakan pemerintah daerah masih belum menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menumbuh kembangkan UMKM. Padahal, kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan, antara lain untuk memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perijinan dan aspek pembiayaan usaha;

- f. Masih rendahnya pola kemitraan antara pelaku usaha kecil, sehingga hasil produk UMKM belum mampu memenuhi permintaan pasar.
- g. Sulitnya UMKM menembus pasar, karena UMKM belum bisa memenuhi aturan spesifikasi dari pengusaha besar;
- h. Masih terbatasnya produktivitas unggulan dari pelaku usaha kecil, dimana UMKM belum memiliki spesifikasi/ciri khas produk dari suatu daerah.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan koperasi dan UKM, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan urusan koperasi dan UKM yaitu **belum optimalnya pengelolaan koperasi dan UKM di Kota Malang serta kurangnya kualitas pengelola koperasi dan UKM.**

K. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Malang lebih dipengaruhi oleh arus migrasi dari pada tingkat kelahiran dan kematian. Dengan demikian, pengendalian administrasi kependudukan harus lebih diperhatikan, karena pertumbuhan penduduk yang dialami akan mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain adalah :

- a. Tingkat migrasi penduduk yang cukup tinggi. Beberapa faktor penyebab tingginya tingkat migrasi di Kota Malang antara lain adalah :

- Kota Malang merupakan daerah pendidikan, industri, perdagangan dan jasa, sehingga mengundang penduduk yang berasal dari luar daerah untuk menjalani pendidikan atau bekerja di Kota Malang. Hal ini menyebabkan tingkat mobilitas penduduk menjadi tinggi;
 - Pertumbuhan penduduk yang disebabkan karena migrasi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk alami;
 - Selain Kota Malang sebagai daerah kawasan pendidikan, Kota Malang juga menjadi kawasan pemukiman. Banyak kawasan pemukiman baru yang dikembangkan di Kota Malang;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem informasi dan administrasi kependudukan dan catatan sipil,
- c. Belum optimalnya validasi kependudukan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
- Sumber daya manusia terutama di tingkat kelurahan dan RT/RW sebagai ujung tombak kegiatan pendataan penduduk masih rendah, sehingga data penduduk yang dilaporkan tidak lengkap dan masih banyak yang tidak sesuai dengan kondisi penduduk yang ada;
 - Pola pikir dan kesadaran sebagian masyarakat untuk melaporkan status kependudukannya kepada petugas

RT/RW setempat dimana mereka tinggal/berdomisili masih perlu ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang belum terdata dalam *database* kependudukan Kota Malang, dan enggan melaporkan keberadaan mereka karena data kependudukan dianggap kurang penting.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan kependudukan dan catatan sipil, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu: **belum optimalnya pengelolaan administrasi dan sistem informasi kependudukan dan catatan sipil di Kota Malang.**

L. KETENAGAKERJAAN;

Urusan ketenagakerjaan terkait dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan ketenagakerjaan antara lain adalah :

- a. Kualitas SDM pencari kerja belum bisa sepenuhnya memenuhi standar lowongan yang ada;
- b. Terbatasnya lowongan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja;
- c. Belum memadainya sistem informasi ketenagakerjaan, karena masih terhambatnya sistem bursa kerja online

yang selama ini dijadikan penghubung informasi antara pekerja dengan pengusaha;

- d. Masih adanya hubungan yang kurang harmonis antara pekerja dengan pengusaha;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kerja, sehingga kualitas SDM pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan ketenagakerjaan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan ketenagakerjaan yaitu: **kurangnya kualitas SDM pencari kerja yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan ketenagakerjaan di Kota Malang.**

M. KETAHANAN PANGAN;

Permasalahan ketahanan pangan mencakup tiga sub sistem yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, lancarnya distribusi pangan dan konsumsi pangan yang bermutu. Berdasarkan permasalahan mendasar dalam urusan ketahanan pangan, maka dirumuskan dalam isu strategis pembangunan urusan ketahanan pangan yaitu: **belum optimalnya pengelolaan ketahanan pangan masyarakat Kota Malang terkait dengan konsumsi pangan yang bermutu.**

N. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;

Pemberdayaan perempuan di Kota Malang masih sangat terbatas, terutama yang terkait dengan fasilitasi kesempatan

melakukan usaha ekonomi produktif bagi perempuan. Persoalan lain, ancaman kekerasan terhadap anak dan perempuan. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah :

- a. Masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- c. Kurangnya perlindungan terhadap anak jalanan;
- d. Pelaksanaan program perlindungan anak dan perempuan belum optimal.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: **kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta belum optimalnya penguatan lembaga perlindungan anak dan perempuan sehingga masih terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.**

O. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA;

Keberhasilan program keluarga berencana memperoleh perhatian yang serius, karena program yang dilaksanakan harus selaras dengan program yang dicanangkan oleh BKKBN. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh pembangunan keluarga kecil yang berkualitas. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
- b. Belum optimalnya pengembangan BKB, BKL, BKR dan PKLK.
- c. Tingkat partisipasi KB masih rendah;
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, maka dirumuskan isu strategis pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yaitu: **belum optimalnya implementasi pemberdayaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kota Malang.**

P. PERHUBUNGAN;

Untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan serta mencapai kesejahteraan masyarakat dibutuhkan sarana transportasi yang memadai. Untuk itu, dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sektor pehubungan antara lain :

- a. Kurang optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penataan dan pengaturan transportasi di Kota Malang. Tingginya jumlah kendaraan dan minimnya pertumbuhan jalan di Kota Malang membuat Pemerintah Daerah dan POLRI

harus melakukan rekayasa dan pengaturan lalu lintas di beberapa titik kemacetan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi mobilitas kendaraan di sekitar kawasan pusat kota dan pusat pendidikan terutama pada hari dan jam kerja;

- b. Belum adanya transportasi massal, mengingat mobilitas orang dan barang di dalam dan antar daerah, terutama pergerakan komuter dari dan ke kawasan industri. Pemerintah Kota Malang perlu memikirkan alternatif transportasi massal yang ramah lingkungan yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas di Kota Malang dan di luar Kota Malang;

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan perhubungan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan sektor perhubungan yaitu: **belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan di Kota Malang.**

Q. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

Penggunaan Teknologi Informatika akan sangat menunjang kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Namun, penerapan Teknologi Informatika di Pemerintah Kota Malang masih belum optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan urusan komunikasi dan informatika antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan sarana komunikasi dan informatika. Sarana yang telah dibangun oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun, sampai saat ini pemanfaatan layanan tersebut belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak Tim Lelang SKPD dan pengguna barang dan jasa (pihak ketiga) yang belum memiliki kompetensi dalam melaksanakan lelang secara elektronik.

- b. Kurangnya kualitas SDM jaringan komunikasi dan informatika. Jumlah SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan analisa beban kerja masih jauh dari mencukupi. Khususnya, setelah dibentuknya UPTD LPSE, dimana banyak SDM Dinas Komunikasi dan Informatika yang dipindah tugaskan ke UPTD tersebut.

Berdasarkan dua permasalahan mendasar dalam urusan komunikasi dan informatika, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan komunikasi dan informatika yaitu **belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.**

R. PERTANAHAN;

Kebijakan pemanfaatan tanah di Kota Malang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang melalui proses perijinan peruntukan penggunaan tanah, sedangkan urusan administrasinya dilakukan

oleh Kantor Pertanahan Nasional. Beberapa permasalahan penting yang dihadapi dalam bidang pertanahan antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya sistem informasi pertanahan;
- b. Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Malang belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan pertanahan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan sektor pertanahan yaitu: **belum optimalnya pengelolaan pertanahan khususnya dalam urusan sertifikasi di Kota Malang.**

S. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI;

Untuk melaksanakan pembangunan daerah dibutuhkan suasana yang aman dan kondusif. Sedangkan, guna menciptakan rasa aman dan kondusif di Kota Malang, terdapat beberapa permasalahan yang mendasar antara lain :

- a. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, karena masih kurangnya personil anggota satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di internal pemerintah daerah, kurang optimalnya penegakan Peraturan Daerah tentang disiplin pegawai adalah kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- b. Kurangnya sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban bagi aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di kedua bidang tersebut. Perlengkapan

yang dimiliki saat ini dirasakan perlu untuk ditingkatkan guna mengantisipasi perkembangan masyarakat.

- c. Masih banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban. Bisa jadi, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
- d. Masih terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdiri tetapi belum memenuhi persyaratan administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- e. Belum tersedianya sarana operasional pendukung kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terutama dalam mendukung program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu : **belum optimalnya penegakan peraturan daerah yang berimbang pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan serta belum optimalnya pengelolaan LSM dan FKUB.**

**T. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN;**

Poin penting yang terkandung dalam otonomi daerah adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan otonomi daerah antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
 - Dalam hal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) belum mengakomodir semua kebutuhan pemohon karena Sistem Pelayanan Informasi Perijinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) belum sepenuhnya melayani semua jenis perijinan yang ada.
 - Persyaratan perijinan yang cukup banyak dapat pula menjadi kendala karena BPPT memberlakukan persyaratan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya. Sehingga, sebagai solusinya, diperlukan peraturan-peraturan lain untuk

menyederhanakan persyaratan perijinan agar pelayanan perijinan menjadi optimal;

- Banyaknya keterkaitan koordinasi dengan SKPD lain dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan perijinan (Rekomendasi dari SKPD lain) mengakibatkan jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan ijin menjadi lebih lama dan birokrasi yang ditempuh menjadi lebih panjang.
- b. Potensi pendapatan daerah belum tergali secara optimal.
- c. Perlunya dilakukan reformasi pelayanan publik yang berkualitas, dengan dukungan implementasi standar pelayanan publik yang cepat, tepat dan benar dan monitoring pelayanan dan pengukuran IKM secara periodik;
- d. Perlunya dilakukan penataan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- e. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, berdasarkan data yang diperoleh aset daerah yang baru disertifikasi sekitar 40%;
- f. Kompetensi pegawai belum mampu memenuhi kebutuhan teknis.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan tersebut adalah **belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan oleh potensi keuangan daerah yang belum tergali secara optimal dan adanya beberapa SKPD yang belum memiliki SPM.**

U. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN;

Dalam perkembangan kedepan, kelurahan berada didepan sebagai ujung tombak pembangunan atau pelaku utama pembangunan. Pemerintah Kota Malang memandang bahwa para pemangku kepentingan secara bersama-sama sesuai posisi dan kewenangannya masing-masing memberikan kontribusi positif untuk memberdayakan masyarakat kelurahan guna menciptakan kemandirian dan kemampuan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa persoalan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, antara lain :

- a. Pemerintah Kelurahan belum memiliki kapasitas yang memadai sehingga belum mampu mengoptimalkan pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan, serta belum menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya dalam pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, sehingga upaya peningkatan kapasitas SDM perlu lebih ditingkatkan secara intensif dan berkelanjutan.

- b. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat dalam membangun kelurahan masih belum optimal. Rendahnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan anggota kemasyarakatan antara lain dipengaruhi oleh belum terintegrasinya perencanaan program pembangunan serta partisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Untuk menyikapi kondisi tersebut, diperlukan penguatan dalam bentuk dukungan keuangan dan pembinaan intensif dan berkelanjutan kepada lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat.
- c. Penciptaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna masih sangat minim, karena sarana dan prasarana sangat terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan yaitu : **belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, karena faktor-faktor pendukungnya yang terdiri dari pemerintahan kelurahan, keuangan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan anggota masyarakat dapat dikatakan masih belum memadai.**

V. SOSIAL;

Tabel 4.14.

Jumlah Dan Prosentase Keluarga Miskin Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga	Persentase keluarga miskin
1	Kedungkandang	1827	58167	3,1%
2	S u k u n	1704	34922	4,9%
3	Klojen	609	57501	1,1%
4	Blimbing	1034	58172	1,8%
5	Lowokwaru	916	50592	1,8%
Kota Malang		6090	259354	2,3%

Jumlah keluarga miskin di Sukun adalah yang terbanyak yaitu 1.704 atau 4,9% diikuti oleh Kecamatan Kedungkandang sebanyak 1.827 atau 3,1%. Permasalahan dalam bidang sosial dipengaruhi oleh kecenderungan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalankan kehidupan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam urusan sosial antara lain adalah :

- a. Merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial seperti perdagangan manusia;
- b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
- c. Belum optimalnya peran lembaga sosial;

- d. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayan sosial;
- e. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam bidang sosial, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan sosial yaitu: **belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan penanganan masalah pengangguran/kemiskinan.**

W. KEBUDAYAAN;

Pembangunan kebudayaan di Kota Malang cenderung diarahkan pada penguatan kebudayaan asli Kota Malang, karena kebudayaan asli Malang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai moral dalam pembangunan Kota Malang. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan di Kota Malang antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesenian;
- b. Kurangnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas masuknya kebudayaan asing;
- c. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya Malang;
- d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan asli Malang.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan kebudayaan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan kebudayaan yaitu : **belum optimalnya pengelolaan nilai-nilai**

kebudayaan dan penyediaan sarana dan prasarana kesenian di Kota Malang.

X. STATISTIK;

Statistik sangat dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid dan akurat. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data statistik daerah. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan statistik antara lain adalah :

- a. Kurangnya SDM yang bergerak dalam pengolahan data statistik, khususnya tenaga ahli statistik;
- b. Sarana dan prasarana pendukung data statistik belum memadai, antara lain belum tersedianya petunjuk teknis penyeragaman data bagi SKPD, belum tersedianya ruang arsip data di masing-masing SKPD.

Berdasarkan dua permasalahan penting dalam bidang statistik, maka dirumuskan isu strategis dalam bidang statistik adalah **belum optimalnya pengelolaan statistik daerah.**

Y. KEARSIPAN;

Pelaksanaan urusan kearsipan terkait dengan pengelolaan arsip aktif maupun arsip statis. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan kearsipan adalah belum optimalnya manajemen arsip daerah karena kurangnya sarana dan prasarana kearsipan, dimana sarana yang ada pada saat ini masih bersifat

manual, serta kurangnya tenaga arsiparis dalam mengelola arsip daerah (arsiparis).

Berdasarkan permasalahan mendasar dalam urusan kearsipan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan kearsipan adalah **belum optimalnya pengelolaan arsip daerah**.

Z. PERPUSTAKAAN.

Pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pemasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan urusan perpustakaan adalah semakin tingginya tingkat membaca buku bagi masyarakat yang perlu dukungan sarana dan prasarana perpustakaan seperti kurangnya mobil perpustakaan keliling yang harus melayani perpustakaan di tingkat kelurahan serta kurangnya tenaga pustakawan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan dalam isu strategis pembangunan urusan perpustakaan yaitu **masih kurangnya fasilitas pendukung perpustakaan**.

AA. PERTANIAN;

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang mempunyai kontribusi di Kota Malang, karena sebagian masyarakat Kota Malang bermata pencaharian sebagai petani. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian antara lain adalah :

- a. Masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian;
- b. Harga hasil produksi pertanian di tingkat petani dan di tingkat pasar lebih rendah.

Berdasarkan dua permasalahan mendasar dalam urusan pertanian, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan pertanian yaitu **belum optimalnya pengelolaan sektor pertanian dan masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian.**

BB. PARIWISATA;

Pariwisata merupakan potensi yang akan diunggulkan sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, jumlah kunjungan wisata ke Kota Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan potensi alam, pendidikan maupun potensi industri dan perdagangan di Kota Malang, objek tujuan wisata diarahkan pada pengembangan potensi wisata dimaksud antara lain meliputi :

1. Potensi wisata religi:
 - Pengembangan sisi sejarah makan Ki Ageng Gribig
2. Potensi wisata kuliner
 - Pengembangan wisata belanja TUGU yang menyediakan aneka ragam kuliner di lokasi Stadion dan Velodrome
 - Pengembangan wisata kuliner aneka makanan tempe di lokasi kampung sanan dengan berbagai varian berbahan baku tempe
3. Potensi wisata minat khusus:
 - wisata budaya dan kesenian dalam bentuk gebyar antara lain Festival Kendedes, Gebyar Jaran Kepang, Gebyar tarian daerah nusantara;
 - Pengembangan situs Karang Besuki ;

- Pengembangan wisata sejarah Tirtan Beji Sari di Kel. Mojolangu ;
- Pengembangan wisata sejarah Cungkup Dakon di Kel. Sukun ;
- Pengembangan wisata sejarah Situs Kendedes di Kel. Polowijen;
- Pengembangan Wisata Museum ;
- Wisata Rakyat Taman Rekreasi Kota Malang (Tareko) dan Pengembangan wisata Eco Green ;
- Pengembangan Wisata Trans Studio di Buring ;
- Pengembangan Wisata Air Sungai ROLAK di Kedung kandang

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain adalah :

- a. Minimnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
- b. Kurangnya infrastruktur pendukung menuju obyek wisata;
- c. Belum optimalnya pengembangan manajemen kepariwisataan;
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan pariwisata, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan pariwisata yaitu : **belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan obyek pariwisata di Kota Malang.**

CC. INDUSTRI;

Sebagai daerah penyangga ibukota provinsi, Kota Malang sangat potensial perkembangannya dalam sektor perindustrian. Industri yang dikembangkan di Kota Malang terdiri dari industri kecil, sedang dan industri besar. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan sektor perindustrian antara lain adalah :

- a. Industri yang dikembangkan di Kota Malang merupakan industri lebih banyak industri kecil dan menengah, belum terdapat industri skala besar, kecuali industri rokok;
- b. Sumber daya manusia (SDM) lokal yang tersedia belum memenuhi kriteria industrialisasi;
- c. Industri kecil belum bisa masuk menjadi subkon (vendor) industri besar.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan perindustrian, maka dirumuskan dalam isu strategis pembangunan urusan perindustrian yaitu :

- 1. Industri yang dikembangkan di Kota Malang kurang berpihak pada industri kecil dan menengah;**
- 2. Pergeseran paradigma ekonomi industri ke Ekonomi Kreatif menuntut upaya pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas untuk mendorong perekonomian yang berdaya saing dan menggali cadangan sumber daya yang terbarukan. Pengembangan industri harus diarahkan pada industri berbasis lapangan usaha**

kreatif dan budaya, lapangan usaha kreatif, dan hak kekayaan intelektual;

- 3. Perkembangan IPTEK dapat mendorong adanya efisiensi produksi untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga bersaing. Industrialisasi menciptakan pola kerja, pola produksi dan pola distribusi yang lebih murah dan lebih efisien. Pada tahapan ini pengembangan sektor industri harus diupayakan pada upaya peningkatan produktivitas dan kapasitas industri, efisiensi rantai nilai produksi, serta penguatan struktur industri dari hulu ke hilir;**
- 4. Semakin sempitnya lahan pertanian di Kota Malang dan menurunnya produksi bahan baku alam dari daerah lain, mengakibatkan melambatnya pertumbuhan industri yang berbasis pada sumber-sumber daya alam seperti industri mebel dan rotan. Kondisi tersebut seharusnya mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan baru, antara lain dengan pengembangan *Green Industry* serta mendorong industri dengan sumber-sumber yang terbarukan. Selain itu, berkurangnya produk pertanian juga berdampak pada penyediaan bahan kebutuhan pokok sehingga pemerintah masih harus mengupayakan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan jaringan dan sistem distribusi komoditas bahan pokok.**

DD. PERDAGANGAN;

Kemajuan perdagangan Kota Malang sangat dipengaruhi oleh produk unggulan antara lain, tempe, keripik tempe, keripik buah selain produk-produk industri yang melayani kebutuhan regional maupun nasional dan internasional. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan sektor perdagangan antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya distribusi dan pemasaran produk lokal;
- b. Masih adanya barang dan jasa yang beredar tetapi tidak memenuhi standar;
- c. Kurangnya promosi terhadap produk unggulan daerah;
- d. Kurangnya pembinaan dan perlindungan terhadap pedagang kecil (lokal);
- e. Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional kurang memadai.

Berdasarkan beberapa permasalahan mendasar dalam urusan perdagangan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan urusan perdagangan yaitu:

- 1. Kurangnya kualitas mutu produk masih menjadi masalah utama, hal ini antara lain disebabkan pelaku usaha tidak mempunyai standar baku yang terukur dari produk yang dihasilkan. Kualitas pruduk yang baik diharapkan mampu menguatkan ekonomi lokal dalam menghadapi perdagangan**

bebas pasca berlakunya *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asean - China Free Trade Area* (AFCTA), dan sebagainya.

2. Diversifikasi produk perlu ditingkatkan untuk strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Diversifikasi produk merupakan langkah dan alternatif yang dapat dilakukan untuk bisa *sustainable* dipasar. Dengan demikian produk lokal akan mampu bersaing ditengah serangan produk-produk yang akan masuk dalam era globalisasi.
3. Pola kemitraan belum dioptimalkan untuk menjawab tuntutan pasar atas dasar tanggung jawab bersama demi tumbuhnya usaha menengah dan usaha kecil dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.
4. Kurangnya kemampuan pelaku ekspor dalam menyerap kesempatan yang ada dan juga tidak adanya informasi pasar luar negeri yang mudah diakses.
5. Belum optimalnya promosi dan distribusi produk unggulan daerah;
6. Kurangnya pembinaan bagi pengusaha lokal;
7. Minimnya sarana dan prasarana pasar tradisional.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun, dan dampaknya sangat luas dalam jangka waktu yang panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu dilaksanakan secara bertahap. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan di daerah cenderung muncul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal. Perumusan permasalahan ini penting untuk merumuskan visi dan misi Kota Malang untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis setiap urusan pemerintahan seperti tersebut pada poin A, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Adanya berbagai dampak dinamika perkembangan kota menuju “kota metropolis”;

Kota Malang sebagai kota besar yang menuju kota metropolis, saat ini sudah dirasakan problematika perkotaan yang berkaitan dengan sarana transportasi, persampahan, kependudukan, dan drainase perkotaan. Dalam rangka mengatasi problematika tersebut perlu

sinergitas dengan wilayah yang berbatasan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu, melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, tata laksana, peningkatan sistem informasi, penegakan hukum dan kerjasama regional.

2. Pengelolaan Kependudukan Yang Berkualitas dan tingginya arus urbanisasi;

Kota Malang sebagai kota besar kedua di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi termasuk didalamnya warga yang bukan sebagai penduduk Kota Malang. Penduduk merupakan subyek pembangunan sekaligus obyek pembangunan, sangat diperlukan akurasi data sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah dalam rangka untuk menata tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan tata laksana yang didukung sistem informasi administrasi kependudukan sampai di tingkat Kecamatan.

Kota Malang sebagai bagian wilayah regional di Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak tingginya arus urbanisasi. Agar urbanisasi bisa dikelola sebagai sebuah potensi yang positif perlu langkah-langkah kebijakan yang bersifat kerjasama antar daerah di Malang Raya.

3. Masih tingginya angka kemiskinan;

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kota Malang sebesar 5,2 %. Kota Malang berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan sebagai wujud kebijakan *Peduli Wong Cilik* sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut melalui keterlibatan lembaga keuangan, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan program pemberdayaan masyarakat yang didasarkan data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

4. Masih tingginya angka pengangguran;

Kota Malang dengan jumlah penduduk yang tinggi berimplikasi adanya peningkatan angka pengangguran. Agar pembangunan ekonomi selain mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Kebijakan yang diambil yaitu dengan menerapkan konsep *pro poor, pro job, pro growth, pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat.

5. Pelaksanaan *Good Governance* dan Reformasi Birokrasi yang belum optimal;

Esensi terwujudnya *good governance* dan reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Pemerintah Kota Malang berkomitmen meningkatkan layanan publik yang didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Langkah yang dilakukan adalah melalui penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

6. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun;

Kualitas kesehatan manusia sangat ditentukan kualitas lingkungan hidup yang ada. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan angka harapan usia hidup lebih panjang, Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Langkah kebijakan yang dilakukan melalui pengendalian pencemaran limbah, peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan penegakan hukum secara konsisten.

7. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi-nya, perijinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan kemitraan dalam penegakan hukum.

Untuk itu diperlukan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

8. Globalisasi yang menuntut kualitas SDM yang handal;
Globalisasi merupakan tantangan yang tidak bisa dihindari yang saat ini sudah mulai kita rasakan. Untuk menghadapi tantangan dimaksud perlu peningkatan kualitas SDM di kelurahan sebagai ujung tombak layanan terdepan, serta meningkatkan daya saing SDM yang ada di kelurahan untuk memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional, termasuk tenaga pendidik untuk menyiapkan masyarakat didik yang handal dan punya daya saing secara global. Selain itu diperlukan penguasaan teknologi informasi yang handal

oleh SDM serta dukungan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

9. Peran perempuan yang belum optimal dalam pembangunan;

Pembangunan Kota Malang yang berjalan pesat memerlukan peran perempuan dalam partisipasi untuk lebih mengoptimalkan proses pembangunan. Kebijakan yang akan diambil antara lain melalui perluasan kesempatan berusaha serta memprioritaskan pembinaan dan pemberdayaan perempuan, khususnya untuk mendapatkan hak yang sama (kesetaraan gender).

10. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;

Mengingat kemajemukan warga Kota Malang terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Malang.

Kebijakan yang diambil antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Malang

termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

11. Potensi kepariwisataan daerah yang belum diberdayakan secara optimal;

Pembangunan pariwisata di Kota Malang sangat potensial, sesuai dengan data BPS, jumlah kunjungan wisata ke Kota Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan potensi yang dimiliki baik dari pendidikan, industri dan perdagangan sangat mendukung untuk pengembangan potensi wisata.

Kebijakan yang diambil diarahkan untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota tujuan wisata dengan didukung oleh potensi wisata religi, wisata kuliner, dan wisata minat khusus.

12. Pelaku ekonomi sektor informal belum diberdayakan secara maksimal;

Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang, maka perlu dikembangkan sektor koperasi, UKM, dan sektor informal. Pembangunan koperasi, usaha kecil menengah, dan sektor informal memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain melalui kemudahan permodalan, kerjasama perbankan, penyediaan zona perdagangan.

13. Pemberdayaan ekonomi sektor formal dan perbaikan iklim investasi;

Investasi merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian Kota Malang dan memerlukan jaminan keamanan dan kepastian hukum serta penyediaan sarana prasarana pendukung investasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, serta dukungan transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, dan infrastruktur pendukung serta penyediaan kawasan industri.

14. Sarana transportasi dan manajemen transportasi yang belum memadai;

Sebagai salah satu kota besar yang mengarah pada kota metropolitan perlu pengembangan sistem transportasi terpadu untuk memperlancar sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, serta peningkatan aksesibilitas bagi barang dan jasa.

Pengembangan sistem transportasi yang mengutamakan pada sistem angkutan umum massal serta manajemen transportasi untuk rekayasa lalu lintas, diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penduduk serta barang

dan jasa di Kota Malang. Selain itu, pengembangan sistem transportasi di Kota Malang harus memperhatikan sistem transportasi wilayah yang lebih luas dan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari dan ke wilayah kabupaten/ kota yang juga semakin meningkat.

15. Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota;

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali.

Dalam memenuhi kebutuhan akan rumah perlu diupayakan pembangunan rumah secara vertikal, baik pada kawasan baru maupun pada kawasan kumuh berat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat. Sedangkan pada kawasan kumuh perlu ditingkatkan kualitas hunian, prasarana sarana lingkungan, serta, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Upaya yang perlu dilakukan antara lain peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip *urban management* sesuai dengan kondisi setempat.

Kebijakan yang diambil adalah sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kerangka kerjasama lainnya.

16. Peningkatan Kualitas Pendidikan;

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kemajemukan warga Kota Malang terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Kota Malang.

Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyiapan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan yang dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja. Upaya lain dalam peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui program pendidikan gratis tingkat SD dan SMP, serta pendidikan gratis tingkat SMA dan SMK bagi siswa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

17. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban;

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan iklim yang kondusif, tentram dan tertib, dengan melibatkan semua elemen masyarakat secara optimal melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.

Kebijakan yang diambil melalui penegakan hukum, pengendalian ketentraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi Kota Malang yang aman, tentram, tertib dan teratur, serta diperlukan juga strategi dan langkah-langkah antisipasi mitigasi bencana.

18. Penguatan Ketahanan Pangan;

Permasalahan ketahanan pangan meliputi tiga sub sistem yaitu : ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, lancarnya distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang bermutu. Tantangan ketahanan pangan di Kota Malang adalah menurunnya luas lahan pertanian tanaman pangan yang diakibatkan perkembangan kota.

Kebijakan yang diambil antara lain melakukan diversifikasi bahan pangan dan olahan pangan pengganti bahan pokok.

19. Pengembangan Kerjasama Antar Kota dan Kabupaten;

Untuk lebih memposisikan Kota Malang sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperlukan kerjasama antar kota dan kabupaten di wilayah Malang Raya dengan mengedepankan posisi Kota Malang sebagai sentra pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerjasama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pengembangan kerjasama antar kota dan kabupaten didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

20. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan.

Sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh dari sumber pembiayaan konvensional dan non-konvensional. Sumber pembiayaan konvensional berasal dari pendapatan daerah. Sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional berasal dari kerjasama pihak pemerintah daerah dengan stakeholder terkait baik swasta maupun masyarakat.

Instrumen pembiayaan non-konvensional ini salah satunya adalah memfasilitasi Tanggung Jawab Sosial

Lingkungan (TJSL) / Corporate Social Responsibilities (CSR) Badan Usaha yang disinergikan dengan program daerah.

Kebijakan pemenuhan pembiayaan pembangunan dilakukan melalui penerbitan surat berharga (obligasi), skema Public Private Partnership (PPP), maupun Corporate Social Responsibility (CSR), serta skema lainnya. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang handal.